



PKL Malioboro Belum Boleh Buka

■ PPKM Diperpanjang

YOGYAKARTA - Pemerintah pusat memutuskan memperpanjang pelaksanaan PPKM darurat sampai dengan 25 Juli 2021. Pemda DIY telah menindaklanjuti keputusan pusat itu dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19.

Meski sekarang istilahnya diubah menjadi PPKM berlevel, aturan yang tertuang didalamnya masih sama dengan PPKM darurat. "Tiga wilayah di DIY yaitu Sleman, Bantul, dan Kota

Yogyakarta masuk kriteria level empat, sedangkan Gunungkidul dan Kulon Progo berada di level tiga. Tapi secara prinsip, perlakuan pada kedua level itu sama dengan kondisi PPKM darurat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, Rabu (21/7).

Sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo, PPKM darurat baru akan dibuka bertahap pada 26 Juli 2021 jika tren kasus menurun. Karena itu aturan PPKM darurat tetap berlaku pula sekarang, termasuk belum diperbolehkannya sektor non esensial beroperasi.

Memberatkan

Sebelumnya, ribuan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang tergabung Komunitas Kawasan Malioboro meminta pemerintah agar mengizinkan mereka berjualan lagi setelah 20 Juli 2021. Namun ditegaskan Aji, kawasan Malioboro baru akan dibuka pada 26 Juli 2021.

"Kalau kita melihat Instruksi Mendagri, mestinya Pemkot Yogyakarta akan membuka

Malioboro pada tanggal 26 Juli nanti," kata Aji.

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati mengatakan, aturan PPKM darurat sangat memberatkan pedagang kaki lima (PKL). Sejak adanya kebijakan tersebut, para PKL di kawasan Malioboro terpaksa tidak berjualan sehingga otomatis penghasilan mereka terhenti. "Penerapan kebijakan semestinya mempertimbangkan efek negatifnya. Kini pemasukan kami macet total, modal sudah habis, dan hutang semakin menumpuk," katanya.

Para pedagang berharap secepatnya diizinkan berjualan lagi, dan akses menuju Malioboro kembali dibuka. Mereka menjamin akan menerapkan protokol kesehatan secara optimal. "Kami minta diberi toleransi agar diperbolehkan lagi berdagang dengan proses yang optimal," ujar Desio.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah memberikan stimulan hibah modal bergulir, serta bantuan sosial tunai bagi warga kalangan PKL.(J1-60)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Maret 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005